

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab. Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

Tasikmalaya - Jawa Barat

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang - undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tasikmalaya, 4 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ZAINI RAHMAN, SH., MH.
NIP.19770301200212591,69 6

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	21
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	21
F. Pengungkapan Penting Lainnya	21
VI. Lampiran dan Daftar	

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265) 544200 Fax. (0265) 546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 4 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ZAINI RAHMAN, SH., MH.
NIP.19770301200212591,69 6

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

(1.) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 13.739.172 atau mencapai 591,69 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 2.322.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 7.999.466.093 atau mencapai 99,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.059.303.000.

(2.) NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.854.106.683 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 830.000 dengan Persediaan sebesar Rp. 830.000 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 14.912.548.950 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 611.875.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 57.821.642 dan Rp. 14.854.106.683.

(3.) LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.447.936 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 8.350.046.296. Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus/defisit

Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 6.318.750 dan Rp. 17.734.986 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (8.328.863.374).

(4.) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 15.197.243.136 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (8.328.863.374) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.985.726.921 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 14.854.106.683.

(5.) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.322.000	13.739.172	591,69	5.698.936
JUMLAH PENDAPATAN		2.322.000	13.739.172	591,69	5.698.936
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	6.374.879.000	6.316.561.378	99,09	6.937.377.090
Belanja Barang	B.4	1.659.424.000	1.658.630.715	99,95	1.144.059.581
Belanja Modal	B.5	25.000.000	24.274.000	97,10	114.495.000
JUMLAH BELANJA		8.059.303.000	7.999.466.093	99,26	8.195.931.671

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.	0	0
Persediaan	C.3.	830.000	5.171.700
Jumlah Aset Lancar		830.000	5.171.700
ASET TETAP			
Tanah	C.4.	8.544.192.000	8.554.192.000
Peralatan dan Mesin	C.5.	3.336.789.764	3.229.447.014
Gedung dan Bangunan		6.358.232.000	6.358.232.000
Aset Tetap Lainnya	C.6.	59.691.751	59.691.751
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.7.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8.	(3.386.353.565)	(2.955.570.481)
Jumlah Aset Tetap		14.912.548.950	15.235.992.284
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9.	11.895.000	11.895.000
Aset Lain-lain	C.10.	19.049.000	401.573.432
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya	C.11.	(30.332.125)	(411.632.807)
Jumlah Aset Lainnya		611.875	1.835.625
JUMLAH ASET		14.913.990.825	15.242.999.609
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.12.	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13.	57.821.642	42.568.973

Pendapatan diterima dimuka	C.14.	2.062.500	3.187.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.821.642	42.568.973
JUMLAH KEWAJIBAN		57.821.642	42.568.973
EKUITAS			
Ekuitas	C.14.	14.854.106.683	15.197.243.136
Jumlah Ekuitas		14.854.106.683	15.197.243.136
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.913.990.825	15.242.999.609

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	3.447.936	2.510.436
JUMLAH PENDAPATAN		3.447.936	2.510.436
BEBAN			
Beban Pegawai	D. 2	6.333.038.995	6.938.811.969
Beban Persediaan	D. 3	43.482.950	39.206.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.172.470.721	808.981.291
Beban Pemeliharaan	D. 5	393.321.546	238.320.875
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	58.791.000	58.720.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	348.941.084	423.809.509
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
JUMLAH BEBAN		8.350.046.296	8.507.850.144
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.346.598.360)	(8.505.339.708)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
		D. 12	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13.576.000	5.190.200
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7.257.250	1.767.200

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.318.750	3.423.000
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(8.328.863.374)	(8.501.916.708)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E. 1	15.197.243.136	14.976.961.131
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(8.328.863.374)	(8.501.916.708)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		0	0
LAIN-LAIN			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	452.171.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	3.069.378
Koreksi Lain-lain		0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7.985.726.921	8.266.958.335
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E. 7	(343.136.453)	220.282.005
EKUITAS AKHIR	E. 8	14.854.106.683	15.197.243.136

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2019 - 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2019 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Mahkamah Agung adalah *"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"*, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah *" Terwujudnya Badan Peradilan Yang Bersih, Berwibawa dan Bermartabat "*

Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah:

1. Menjaga Kemandirian sebagai Lembaga Peradilan;
2. Memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas dan tranparansi peradilan;
4. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar serta modern;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan tupoksi;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	591,69 %

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2019 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2019.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
13.739.172*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 13.739.172 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.322.000	13.739.172	591,69
2.	Penerimaan Perpajakan	0	0	0,00
3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.322.000	13.739.172	591,69

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.040.236,- atau 141,08 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2020 mengalami penambahan pendapatan dari sewa kantin sehingga tidak hanya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari Rumah Dinas Pimpinan saja yang tercatat sebagai pendapatan.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.739.172	5.698.936	8.040.236	141,08
2.	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0
3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0
Total Pendapatan		13.739.172	5.698.936	8.040.236	141,08

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp.
7.999.466.093

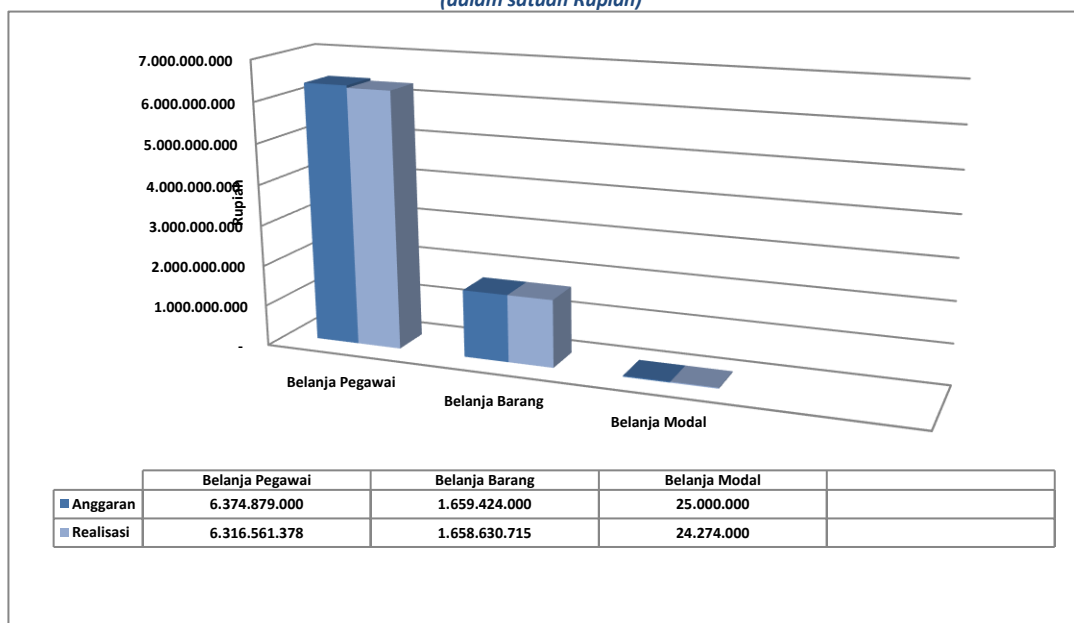
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 7.999.466.093 atau sebesar 99,26% dari anggaran belanja sebesar Rp.8.059.303.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.374.879.000	6.316.561.378	99,09
Belanja Barang	1.659.424.000	1.658.630.715	98,54
Belanja Modal	25.000.000	24.274.000	97,10
Total Belanja Bruto	8.059.303.000	7.999.466.093	99,26
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	8.059.303.000	7.999.466.093	99,26

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja Negara TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 196.465.578 atau sebesar (2,97)% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Penurunan pagu Belanja Pegawai, pemotongan pagu belanja barang untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 serta Pagu Belanja Modal yang juga hanya sedikit.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	6.316.561.378	6.937.377.090	(620.815.712)	(8,94)
Belanja Barang	1.658.630.715	1.144.059.581	(514.571.134)	(44,97)
Belanja Modal	24.274.000	114.495.000	(90.221.000)	(78,79)
Total Belanja	7.999.466.093	8.195.931.671	196.465.578	(2,39)

B.3. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
6.316.561.378*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 6.316.561.378 dan Rp. 6.937.377.090. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 620.815.712 atau sebesar 8,94% dari realisasi tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya mutasi dan promosi pegawai keluar tanpa ada pegawai yang masuk sehingga belanja Pegawai mengalami penurunan pada periode ini. Adapun sisa pagu telah ditarik oleh pusat untuk dialokasikan kepada satuan kerja yang mengalami pagu minus pada belanja pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.316.561.378	6.937.377.090	(620.815.712)	(8,94)
Belanja Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	6.316.561.378	6.937.377.090	(620.815.712)	(8,94)

Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0	0
Total Belanja Netto	6.316.561.378	6.937.377.090	(620.815.712)	(8,94)

B.4. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.658.630.715*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.1.658.630.715 dan Rp. 1.144.059.581,-.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 514.571.134 atau 44,97% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu belanja barang pada TA 2020 berupa bantuan sewa rumah dinas untuk hakim dan adanya Anggaran Biaya Tambahan untuk pemeliharaan gedung dan banagunan serta untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda 4.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	881.163.568	584.824.393	296.339.175	50,67
Belanja Barang Persediaan	33.322.500	43.280.300	(9.957.800)	(23,00)
Belanja Jasa	292.532.101	222.096.613	70.435.488	31,71
Belanja Pemeliharaan	392.821.546	235.138.275	157.683.271	67,05
Belanja Perjalanan Dinas	58.791.000	58.720.000	71.000	0,12
Total Belanja Brutto	1.658.630.715	1.144.059.581	514.571.134	44,97
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.658.630.715	1.144.059.581	514.571.134	44,97

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 24.274.000 dan Rp. 114.495.000. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami Penurunan sebesar Rp. 90.221.000 atau 78,79% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan pada TA 2020 anggaran belanja modalnya lebih sedikit dibandingkan TA 2019.

Belanja Modal Pada TA 2020 berupa :

1. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung SIPP / Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa 2 Unit PC Komputer sesuai BAST Nomor : BAST/SO012200515724432/PKM-P2005-2742864 TANGGAL 11 Mei 2020 senilai Rp. 24.274.000,-

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Gedung dan Bnagunan	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.274.000	114.495.000	90.221.000	78,79
Total Belanja Brutto	24.274.000	114.495.000	90.221.000	78,79
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	24.274.000	114.495.000	90.221.000	78,79

B.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0..

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%

Belanja Modal Gedung dan Bnagunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi
Belanja Modal
:
Rp.109.915.70
0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 24.274.000 dan Rp. 114.495.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 90.221.000 atau 78,79 % dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada TA 2020 pagu belanja modalnya lebih sedikit dibandingkan dengan TA 2019. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Komputer Unit	24.274.000	0	24.274.000	100
Laptop	0	99.229.000	0	0
Printer	0	0	0	0
Router	0	0	0	0
Scanner	0	0	0	0
Server	0	0	0	0
Lainnya	0	14.734.000	0	0
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	24.274.000	114.495.000	(90.221.000)	78,79
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 12 Rincian Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.2. Belanja Dibayar Dimuka

Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 0.

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 2.534.800. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat telah dibayarkannya secara penuh persekot gaji para pegawai. Tidak terdapat belanja dibayar dimuka untuk TA 2020 karena tidak ada Perskot Gaji. Rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Belanja Dibayar Dimuka	0	2.534.800
Jumlah	0	2.534.800

C.3. Persediaan

Persediaan: Rp. 830.000

Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.830.000 dan Rp. 5.171.700 Persediaan merupakan jenis aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan pada tanggal neraca yang diperoleh yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	830.000	5.171.700
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0
Jumlah	830.000	5.171.700

C.4. Tanah

*Tanah: Rp.
8.554.192.000*

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.544.192.000 dan Rp. 8.554.192.000. Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	140	10.18.72.02.4..00016	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Rumah Dinas	113.888.000
2	1	5.433	10.18.24.09.4.00017	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Kantor PA. Tasikmalaya	8.430.304.000
Jumlah		5.573				8.544.192.000

Terjadi kenaikan pada aset berupa tanah di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebesar Rp. 7.565.330.000. Hal ini disebabkan adanya Revaluasi nilai BMN untuk Tanah oleh KPKNL Tasikmalaya.

C.5. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
3.336.789.764*

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.336.789.764 dan Rp. 3.229.447.014. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	3.229.447.014
Mutasi Tambah:	
Pembelian Peralatan dan Mesin	24.274.000
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2020	3.336.789.764
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(2.649.132.056)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	653.415.470

Terjadi perubahan pada Aset Peralatan dan Mesin.

C.6. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
59.691.751*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 59.691.751,- dan Rp. 59.691.751,-.

Tidak ada penambahan nilai aset tetap lainnya pada periode 31 Desember 2020 yaitu masih dengan nilai Rp. 59.691.751 yang terdiri dari Monografi senilai Rp. 54.967.401,- dan aset tetap lainnya senilai Rp. 4.724.350,- Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per Juni 2019	59.691.751
Mutasi Tambah	0

Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	59.691.751
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	59.691.751

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.7. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [3.386.353.565]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing Rp. (3.386.353.565) dan Rp. (2.955.570.481).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.336.789.764	(2.560.070.707)	613.615.732
2	Gedung dan Bangunan	6.358.232.000	(1.439.133.261)	5.754.817.800
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	59.691.751	0	0
	Jumlah	9.248.009.026	(2.839.775.712)	6.408.233.314

C.9. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain:
Rp. 401.573.432

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.049.000 dan Rp.401.573.432. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	401.573.432
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	19.049.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(19.049.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
: Rp.
[401.573.432]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing Rp. (30.332.125) dan Rp. (411.632.807) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	401.573.432	(401.573.432)	
	Jumlah	401.573.432	(401.573.432)	

C.11. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 0*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 57.821.642 dan Rp. 42.568.973. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Utang kepada Pihak Ketiga	57.821.642	42.568.973
Jumlah	57.821.642	42.568.973

C.13. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
14.854.106.683

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 14.854.106.683 dan Rp. 15.197.243.136. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP :
Rp.1.161.468*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 3.447.936 dan Rp. 2.510.436 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.447.936	2.510.436	37,34
Total Pendapatan	3.447.936	2.510.436	37,34

Pendapatan Lain-lain berasal dari para pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2020.

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
6.333.038.995*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.333.038.995 dan Rp. 6.938.811.969. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji	2.119.645.526	2.268.998.157	(149.352.631)	(6,58) %
Beban Tunjangan-tunjangan	4.196.915.852	4.668.378.933	471.463.081	10,09 %

Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0	0
Jumlah	6.333.038.995	6.938.811.969	(605.772.974)	(8,73)%

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp.43.482.950*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.482.950 dan Rp. 39.206.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	43.482.950	39.206.500	4.276.450	10,90
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	43.482.950	39.206.500	4.276.450	10,90

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :
Rp.1.172.470.721*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.172.470.721 dan Rp. 808.981.291. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operaional	879.963.568	583.804.893	296.158.675	50,72
Beban Langganan Daya dan Jasa	292.532.101	222.096.613	70.435.488	31,71
Beban Jasa Pos dan Giro	1.200.000	1.019.500	180.500	17,70
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	1.172.470.721	808.981.291	363.489.430	44,93

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.393.321.546*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 393.321.546 dan Rp. 238.320.875. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.975.580	107.783.000	111.192.580	103,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173.845.966	55.338.686	118.507.280	214,14
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	393.321.546	238.320.875	155.000.671	65,03

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.58.791.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.791.000 dan Rp. 58.720.000. Beban

tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	51.591.000	51.520.000	71.000	0,12
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	7.200.000	7.200.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	58.791.000	58.720.000	71.000	0,12

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- ; Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-; Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.348.941.084*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 348.941.084 dan Rp. 423.809.509. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	178.000.586	150.315.721	27.684.865	18,41
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	139.048.156	168.160.830	(29.112.674)	(17,31)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	611.875	1.223.750	(611.875)	50
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	348.941.084	423.809.509	(74.868.425)	(17,66)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus

(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.
8.481.285.656*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.197.243.136 dan Rp. 14.976.961.131.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : Rp.
(8.328.863.374)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. (8.328.863.374) dan Rp. (8.501.916.708). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 452.171.000 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah
Rp.
14.854.106.683 masing-masing sebesar Rp. 14.854.106.683 dan Rp. 15.197.243.136.

F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pada Laporan Keuangan Tahunan TA 2020, DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu mengenai Pemaksimalan penyerapan anggaran menurut rencana penarikan serta Perbaikan Pagu Minus belanja pegawai.

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A. Peralatan dan Mesin					
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	3,341,088,264	(2,879,973,177)	461,115,087
2.	Alat Kantor	174	390,845,529	(348,330,424)	42,515,105
3.	Alat Rumah Tangga	533	985,402,452	(969,175,895)	16,226,557
4.	Alat Studio	7	32,532,500	(19,048,350)	13484150
5.	Komputer Unit	63	717,798,475	(549,879,566)	167,918,909
6.	Peralatan Komputer	34	194,814,099	(184,184,727)	10,629,372
B. Gedung dan Bangunan					
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6	6,315,323,000	(499,285,864)	5,816,037,136
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
D. Aset Tetap Lainnya					
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	0
2.	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	0	0	0	0
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan					
			38.139.500	(38.139.500)	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			3.529.359.00	
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			3.529.359.00	

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

01

0200

682150

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA K

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUN

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}